

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pada bulan April sampai November 2009.

3.2 Alat dan Bahan.

Alat dan bahan yang diperlukan adalah klinometer, *Global positioning system* (GPS), pita ukur panjang 25/ 50 meter, busur, alat pencatat yang terdiri dari clip-board, tabel pencatatan, dan alat tulis.

3.3 Metode Penelitian

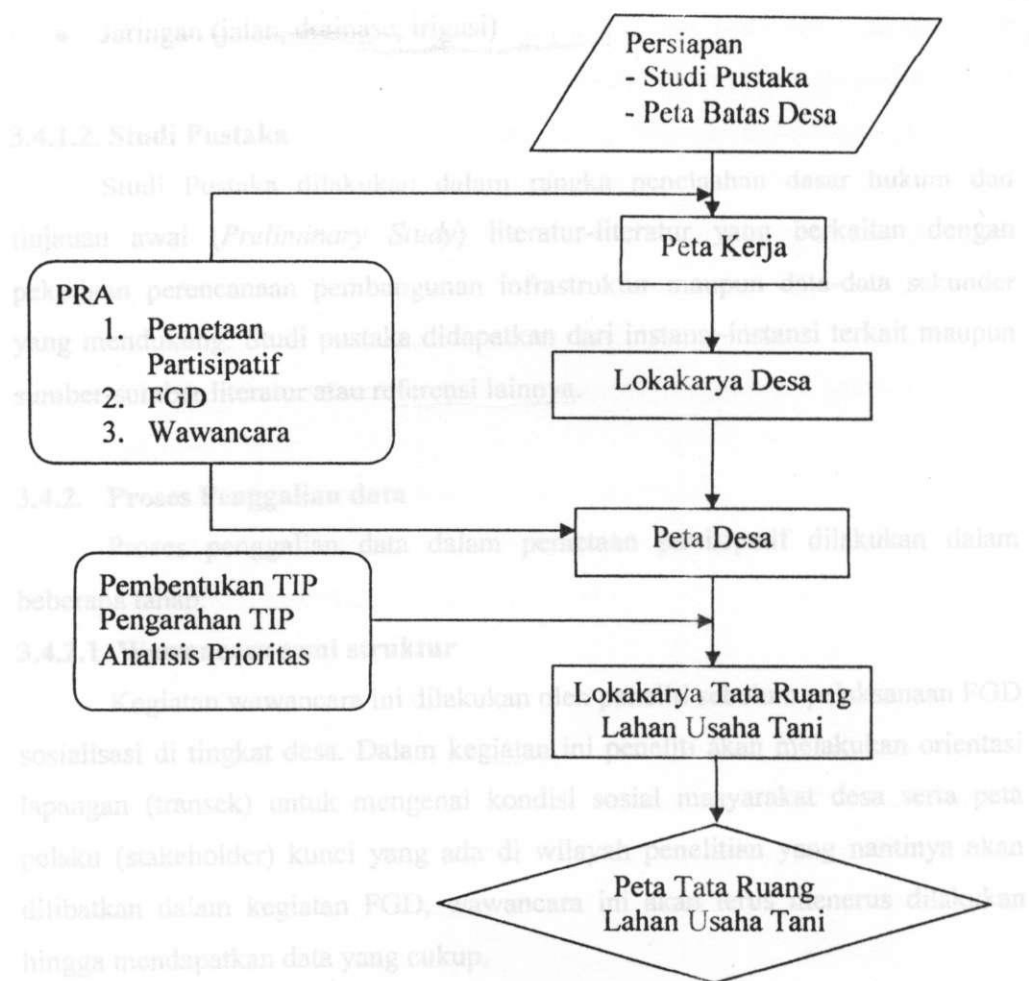
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang meliputi wawancara secara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Masyarakat desa secara partisipatif menggambarkan tata-letak unsur-unsur yang terdapat pada lahan yang digarapnya di atas media kertas agar secara transparan dapat diketahui oleh masyarakat luas, tentang kondisi dan situasi aktual lahan desa, lebih lanjut peta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan pemanfaatan lahan desa. Unsur batas yang digambarkan oleh masyarakat pada peta lahan didasarkan pada kondisi yang ada di lapangan serta tidak bermaksud untuk men-justifikasikan status lahan. Untuk menghindari konflik status lahan yang dapat diakibatkan oleh hasil peta lahan partisipatif ini, maka proses penggambaran peta lahan partisipatif, termasuk pengukuran lahan di lapangan, kelompok masyarakat yang melaksanakan pemetaan lahan partisipatif perlu didampingi oleh perangkat desa/ kelurahan. Dimana Alur proses pelaksanaan penelitian disajikan pada gambar 1.

gambar 1. alur proses

peta batas desa. Is

alasan mengapa

- tidak ada
- orang



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penelitian

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Penyiapan Data

3.4.1.1 Penyiapan Peta Batas Desa

Langkah selanjutnya adalah penyiapan peta batas desa. Isi peta batas desa minimal meliputi :

- Batas desa
- sungai

- Jaringan (jalan, drainase, irigasi)

3.4.1.2. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dalam rangka penelaahan dasar hukum dan tinjauan awal (*Preliminary Study*) literatur-literatur yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan pembangunan infrastruktur maupun data-data sekunder yang mendukung. Studi pustaka didapatkan dari instansi-instansi terkait maupun sumber-sumber literatur atau referensi lainnya.

3.4.2. Proses Penggalan data

Proses penggalan data dalam pemetaan partisipatif dilakukan dalam beberapa tahap:

3.4.2.1. Wawancara semi struktur

Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan FGD sosialisasi di tingkat desa. Dalam kegiatan ini peneliti akan melakukan orientasi lapangan (transek) untuk mengenal kondisi sosial masyarakat desa serta peta pelaku (stakeholder) kunci yang ada di wilayah penelitian yang nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan FGD, wawancara ini akan terus menerus dilakukan hingga mendapatkan data yang cukup.

3.4.2.2. Focus Group Discussion (FGD)

Focussed Group Discussion (FGD) adalah kegiatan diskusi mengenai topik tertentu dalam rangka menggali data dan informasi yang bersifat eksisting maupun program, terkait dengan komponen-komponen infrastruktur di wilayah studi. FGD ini akan dilakukan secara berkelanjutan hingga data yang dicari didapatkan. Kegiatan diskusi ini lebih efektif dalam pembahasan permasalahan karena lebih fokus dan terarah.

Beberapa hal yang diharapkan dari kegiatan FGD ini adalah:

- Pengumpulan data kualitatif yang efektif dan efisien untuk mendapatkan data mengenai peta desa melalui diskusi dan pembahasan dengan seluruh *stakeholder* pembangunan

- Dinamika kelompok yang terbangun dapat difokuskan pada pemetaan desa dan tata ruang lahan usaha tani sehingga secara otomatis dapat diketahui seberapa jauh terdapat konsistensi dan kesamaan persepsi atau pandangan di kalangan peserta.
- Kelompok peserta dapat melakukan kendali mutu data, informasi, dan output pekerjaan serta saling mengecek, sehingga dapat dihindarkan perbedaan pendapat dan persepsi dalam pembuatan peta desa atau penyusunan tata ruang.

FGD diikuti oleh *stakeholder* pembangunan yang meliputi:

- Perwakilan dari masyarakat (tokoh pemuda, wanita, pendidikan, agama)
- Lembaga adat
- Aparat pemerintahan (desa, kecamatan, dan kabupaten)
- Pemerintah daerah melalui dinas yang terkait
- Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)
- Pihak Swasta

3.4.2.3. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif adalah suatu pendekatan partisipatif dari masyarakat untuk menilai serta merumuskan sendiri berbagai persoalan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan mengkompilasi pemecahannya.

3.4.3. Peta Kerja

Peta kerja adalah peta hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat yang telah dibentuk dan disusun, peta kerja berasal dari lembaran-lembaran peta yang belum tersusun dan belum mempunyai grid, maka setelah peneliti membuat grid dan menggabungkannya secara rapi maka itu disebut peta kerja. Peta secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas, tetapi munculnya komputer dan penyebarannya sudah merevolusionerkan kartografi. Peta kerja ini masih berupa data *hardcopy* maka untuk menjadikannya data digital diperlukan proses kartografi. Peta-peta dasar yang diperlukan untuk rujukan adalah peta tanah, peta batas desa dan peta topografi.

3.4.4. Lokakarya Desa

1. Lokakarya Desa diselenggarakan setelah (a) serangkaian diskusi di semua dusun untuk identifikasi dan potensi sumberdaya selesai dilakukan, dan (b) peta desa selesai dibuat.
2. Lokakarya Desa diselenggarakan oleh warga desa dengan dihadiri oleh sebanyak mungkin warga yang diharapkan benar-benar merupakan representasi dari seluruh kelompok dan dusun yang ada di desa tersebut. Pastikan bahwa warga yang biasanya terpinggirkan seperti wanita, jompo, cacat, dan kelompok termiskin, terwakili dalam Lokakarya Desa.
3. Lokakarya Desa membahas agenda-agenda berikut:
 - (a) presentasi peta Desa hasil dari pemetaan partisipatif
 - (b) pembahasan dan pengesahan peta Desa (TIP)

3.4.5. Peta Desa

Peta desa adalah peta batas desa yang telah dilengkapi dengan berbagai data dan informasi terbaru. Sumber data dan informasi desa dapat diperoleh dari:

- Pemetaan partisipatif yang telah dilakukan sebelumnya dan telah disetujui oleh masyarakat desa.
- Survey lapangan (untuk melengkapi data-data hasil pemetaan partisipatif sebelumnya).

Proses Penyusunan Peta Desa:

- Survey lapangan (ground survey); untuk mengumpulkan semua data dan informasi terkini dari kondisi lapangan.
- Survey instansional, mengumpulkan dokumen perencanaan yang ada (RTRW – RPJMDes) yang berkaitan dengan pemetaan partisipatif dan
- Verifikasi lapangan, untuk mencocokkan sekali lagi calon Peta Desa dengan kondisi lapangan dan sekaligus mengecek apakah semua kondisi lapangan telah tergambarkan dalam Peta Desa.

Proses pemindahan data ada beberapa langkah:

1. Memindai (scan) ini dilakukan karena sumber data masih berupa peta kertas. Alat ini dapat dipakai untuk membaca sebuah dokumen yang tertulis pada sebuah

kertas, dengan cara melewatkan pendeteksi image pada kertas tersebut. Selain membaca image atau gambar, beberapa scanner mampu mengambil teks dari kertas. Alat ini merupakan alat optis yang dapat mengkonversikan citra seperti foto ke dalam bentuk digital supaya dapat disimpan atau diolah di komputer.

2. Menentukan titik ikat, minimal 4 titik ikat yang telah diketahui koordinatnya menggunakan GPS dilapangan.

3. Registrasi, merupakan pemasukan koordinat peta digital dengan koordinat bumi.

4. Selanjutnya dilakukan proses digitasi, yaitu merubah format *hardcopy* ke digital.

data primer, sekunder, maupun kebutuhan dasar. Dari hasil analisis

3.4.6. Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP)

dan sarana

Salah satu hasil dari kegiatan FGD adalah pembentukan Tim Inti Perencana (TIP). Anggota TIP setidaknya dapat mewakili aspirasi seluruh warga masyarakat di tingkat dengan jumlah anggota tidak lebih dari 15 orang. TIP ini dibentuk melalui forum FGD dan difasilitasi oleh peneliti. TIP beranggotakan warga masyarakat yang memiliki latar belakang/pengalaman dalam perencanaan dan punya pengalaman dalam usaha tani. Tugas TIP adalah melaksanakan seluruh proses perencanaan tata ruang lahan usaha tani di tingkat masyarakat yang hasilnya akan selalu dikonsultasikan ke warga masyarakat.

dan

3.4.7. Pengarahan TIP

Sebelum melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyiapkan penyusunan rencana tata ruang lahan usaha tani, TIP akan diberikan pengarahan terlebih dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemetaan partisipatif dan penyusunan rencana tata ruang lahan usaha tani yang diarahkan oleh peneliti.

3.4.8. Analisis Skala Prioritas

yang

Setelah pembentukan dan pelatihan TIP maka langkah selanjutnya adalah menetapkan pembangunan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu sehingga diperlukan suatu analisis. Perencanaan pembangunan infrastruktur dirinci hingga perumusan program pembangunan, penahapan, serta sistem pengelolaannya. Hal

ini karena suatu rencana pembangunan dapat dilaksanakan bila ketiga aspek penting tersebut telah disusun dengan tepat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu indikasi program adalah sebagai berikut:

- Skala Prioritas

Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk komponen-komponen infrastruktur yang mempunyai tingkat *urgensi* tinggi menjadi prioritas utama. Tingkat *urgensi* tinggi ini diperoleh dari hasil analisis kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dengan menggunakan standar kebutuhan yang ada dan aspirasi masyarakat. Selain itu, sebagai bahan kajian utama adalah perlunya diperhatikan jenis kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan dasar. Dari hasil analisis tersebut diperoleh urutan skala prioritas kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan yang benar-benar sesuai dengan kondisi eksisting dan kebutuhan masyarakat di wilayah perencanaan lahan usaha tani.

- Waktu Perencanaan dan Pelaksanaan

Apabila komponen-komponen infrastruktur dinilai memiliki tingkat *urgensi* tinggi yang sama maka pemeringkatan skala prioritas dapat dilakukan dengan dasar pertimbangan waktu perencanaan atau pelaksanaannya. Penilaiannya adalah bila elemen infrastruktur dengan waktu perencanaan dan pelaksanaannya lebih pendek/cepat maka dapat lebih diprioritaskan. Demikian juga sebaliknya, bila elemen kebutuhan tersebut memiliki masa perencanaan dan pelaksanaan lebih panjang/lama dapat masuk pada skala prioritas berikutnya.

- Kemampuan Pendanaan

Kemudian bila dari kedua pertimbangan di atas mempunyai skala prioritas yang sama, maka kemampuan pendanaan akan sangat menentukan urutan skala prioritas. Berdasarkan kondisi kemampuan pendanaan tentu akan dipilih elemen kebutuhan dengan anggaran terkecil untuk menjadi prioritas utama. Demikian seterusnya, sampai suatu kawasan memiliki kemampuan dana yang memadai untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana usaha tani dengan anggaran lebih besar.

3.4.9. Lokakarya Tata Ruang Lahan Usaha Tani

1. Diselenggarakan setelah
 - (a) serangkaian hasil diskusi di semua dusun tentang identifikasi dan pemrioritasan masalah, kebutuhan, dan potensi sumberdaya, dan
 - (b) draft peta tata ruang baru selesai dibuat
2. Kegiatan Lokakarya tata ruang ini dilakukan melalui tehnik FGD.
3. Lokakarya tata ruang diselenggarakan oleh warga dengan dihadiri oleh sebanyak mungkin warga yang diharapkan benar-benar merupakan representasi dari seluruh kelompok yang ada di tersebut. Pastikan bahwa warga yang biasanya terpinggirkan seperti wanita, jompo, cacat, kelompok termiskin, terwakili dalam Lokakarya tata ruang.
4. Lokakarya tata ruang lahan usaha tani membahas agenda-agenda berikut:
 - (a) presentasi hasil-hasil dari wawancara yang telah digali sebelumnya,
 - (b) penyusunan dan penetapan strategi dan pilihan aksi pembangunan,
 - (c) penyusunan dan penetapan rencana implementasi,
 - (d) presentasi draft peta tata ruang,
 - (e) menunjukkan hasil pemetaan partisipatif yang telah dilakukan oleh masyarakat.

3.4.10. Peta Rencana Tata Ruang Lahan Usaha Tani

Peta rencana tata ruang lahan usaha tani diperoleh dari pengamatan lapangan akan disusun dan dilaporkan berdasarkan hasil dari pengamatan langsung di lapangan dan pemetaan partisipatif lalu dibandingkan mana yang akan perlu dibangun terlebih dahulu berdasarkan analisis skala prioritas yang telah disetujui oleh masyarakat desa dan perangkatnya dalam Lokakarya. Peta rencana tata ruang lahan usaha tani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan yang akan dikembangkan di desa Dayun.